

Menjaga anak-anak tetap aman di lingkungan digital: Pentingnya perlindungan dan pemberdayaan

Ledakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi anak-anak dan remaja untuk mengetahui hak-hak mereka. Semakin banyak anak yang terhubung untuk pertama kalinya setiap hari, baik di perangkat pribadi atau bersama. Namun, akses yang lebih luas dan lebih mudah tersedia ke Internet dan teknologi digital juga menimbulkan tantangan signifikan terhadap konektivitas yang berarti dan hak-hak anak, termasuk keselamatan mereka. Dampaknya berkisar dari ancaman hingga perlindungan data pribadi dan privasi, hingga pelecehan dan cyberbullying, konten online yang berbahaya, *grooming* untuk tujuan seksual, serta pelecehan dan eksploitasi seksual.

Tantangan global perlindungan anak online (child online protection/COP) membutuhkan respon global, kerjasama internasional, dan koordinasi nasional. Dengan ketergantungan yang lebih besar pada teknologi digital, pandemi COVID-19 memperburuk risiko yang sudah ada sebelumnya untuk anak-anak secara online dan menekankan perlunya tindakan yang mendesak.

Tantangan dan ancaman tetap ada karena sifat lingkungan online tanpa batas di antara alasan lain yang menghambat perlindungan anak melalui kurangnya kerangka kerja, rencana, strategi, sumber daya legislatif internasional dan nasional yang berdedikasi, termasuk pendanaan, dan lembaga untuk memastikan perlindungan online anak.¹

Strategi perlindungan online anak yang inklusif dan multifaset dengan langkah-langkah dan kegiatan yang efektif dan tepat sasaran termasuk sumber daya keuangan dan manusia untuk menerapkan strategi tersebut diperlukan di semua tingkatan. Hanya dengan pendekatan multi-stakeholder yang terkoordinasi dan kooperatif, anak-anak dan generasi mendatang akan dilindungi dan diberdayakan untuk berkembang di lingkungan digital.

¹ UNICEF. 2020. *Action to End Child Sexual Abuse and Exploitation: A Review of the Evidence*

Dengan [69 persen anak muda online di 2019](#),¹ dan [satu dari tiga anak dengan akses internet di rumah](#),

Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan anak-anak, menghadirkan banyak kemungkinan bagi anak-anak dan remaja untuk berkomunikasi, belajar, bersosialisasi dan bermain, memaparkan anak-anak pada ide-ide baru dan sumber informasi yang lebih beragam, membuka peluang partisipasi politik dan sipil bagi anak-anak untuk berkembang, menjadi kreatif, dan berkontribusi secara bermakna untuk masyarakat yang lebih baik.²

Dengan lebih dari 1 miliar anak tidak lagi masuk ke gedung sekolah, mereka belajar dari jarak jauh pada tahun 2020 dan hingga 2021, pandemi COVID-19 telah menggarisbawahi pentingnya konektivitas yang bermakna sebagai (dalam banyak kasus) sarana yang layak untuk akses ke pendidikan dasar,

¹ ITU. 2020. *Measuring digital development: Facts and figures*

² UNICEF. 2020. *Digital civic engagement by young people*
UNICEF. 2020. *Pandemic participation: youth activism online in the COVID-19 crisis*
Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children. 2021. *Children as agents of positive change*

interaksi sosial, dan akses ke layanan bantuan dan dukungan. Konektivitas yang dapat diakses dan terjangkau semakin menjadi penentu kesempatan yang sama bagi anak-anak khususnya bagi mereka yang tertinggal dalam sistem saat ini – baik karena kemiskinan, disabilitas, ras, etnis, gender, pengungsian, atau isolasi geografis. TIK dapat membantu mereka memenuhi potensi pendidikan mereka, memfasilitasi inklusi sosial mereka, dan memperkuat suara mereka dalam partisipasi masyarakat – sesuai dengan hak-hak mereka di bawah United Nations Convention on the Rights of the Child (UN CRC).



Figure 1 Di tingkat global, satu dari tiga pengguna internet adalah anak di bawah usia 18 tahun.

Sementara mendukung dan mempromosikan hak-hak anak, lingkungan online dapat membuat anak-anak menghadapi risiko, beberapa di antaranya dapat menyebabkan potensi bahaya.³ Pada April 2020 saja, Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksplotasi (National Center for Missing and Exploited Children/NCMEC) mendaftarkan empat juta laporan dugaan materi pelecehan seksual anak (child sexual abuse material/CSAM) secara online, dibandingkan dengan satu juta untuk periode yang sama pada 2019.⁴

Oleh karena itu, perlindungan online anak berupaya mengurangi risiko dan melindungi anak-anak dari bahaya yang mungkin mereka hadapi saat online. Ini termasuk⁵:

- risiko konten: paparan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap, konten yang tidak pantas atau bahkan kriminal seperti paparan konten dewasa/ekstremis/kekerasan/berdarah, konten yang terkait dengan pelecehan dan tindakan yang merugikan diri sendiri, perilaku destruktif dan kekerasan, radikalisasi atau berlangganan konten rasis atau ide-ide diskriminatif;
- risiko kontak dari orang dewasa atau teman sebaya: pelecehan, pengucilan, diskriminasi, pencemaran nama baik dan kerusakan reputasi, dan pelecehan dan eksploitasi seksual termasuk pemerasan, *grooming* (seksual), materi pelecehan seksual anak, perdagangan dan eksploitasi seksual anak dalam perjalanan dan pariwisata juga sebagai perekrutan kelompok ekstremis;
- risiko kontrak: paparan terhadap hubungan kontrak yang tidak pantas, persetujuan anak-anak secara online, pemasaran secara tersirat, perjudian online, serta pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi seperti peretasan, penipuan dan pencurian identitas, penipuan, bias profil;
- Risiko tingkah laku: seperti berbagi konten seksual yang dibuat sendiri atau risiko yang ditandai melalui aktivitas teman sebaya yang bermusuhan dan penuh kekerasan seperti cyberbullying, penguntitan, pengucilan, dan pelecehan.



Figure 1 Lebih dari 1,5 miliar anak tidak menghadiri pelajaran di sekolah karena COVID-19

Di tingkat global, satu dari tiga pengguna Internet adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun.

Lebih dari satu setengah miliar anak terkena dampak penutupan lembaga pendidikan pada puncak krisis COVID-19 pada tahun 2020.

Lebih dari sepertiga anak muda di 30 negara melaporkan telah ditindas di dunia maya, dengan 1 dari 5 anak bolos sekolah karena hal itu. Sekitar 80 persen anak-anak di 25 negara melaporkan merasa dalam bahaya pelecehan atau eksploitasi seksual secara online.¹

Pada tahun 2020, NCMEC CyberTipline menerima 21,7 juta laporan dugaan CSAM, meningkat 28 persen dari 2019.

¹ UNICEF. 2020. Protecting children



Figure 2 Lebih dari sepertiga anak muda di 30 negara melaporkan pernah mengalami cyberbullying, dengan 1 dari 5 bolos sekolah karena hal itu.



Figure 3 Sekitar 80% anak-anak di 25 negara melaporkan merasa dalam bahaya pelecehan atau eksploitasi seksual secara online.

UN CRC mengakui bahwa anak-anak adalah kelompok yang sangat rentan dan menjunjung tinggi hak-hak anak termasuk antara lain hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, hak atas privasi, kebebasan berekspresi atau hak untuk berpartisipasi, semuanya dalam konteks prinsip-prinsip kapasitas yang berkembang. Hak-hak ini juga berlaku di lingkungan digital sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh UN CRC General Comment No. 25 (2021) tentang hak-hak anak dalam kaitannya dengan lingkungan digital.⁶ Melindungi anak-anak dan remaja adalah tanggung jawab bersama dan pembuat kebijakan, industri, orang tua, pengasuh, pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya harus memastikan masa depan yang berkelanjutan agar anak-anak dan remaja dapat berkembang dan memenuhi potensi mereka - online dan offline - dan lingkungan digital yang aman-oleh-desain dan memberdayakan bagi mereka terjamin.

³ Global Partnership to End Violence against Children and partners (ITU, UNESCO, UNICEF, UNODC, WePROTECT Global Alliance and World Childhood Foundation USA). 2020. Technical note: COVID-19 and its implications for protecting children online

⁴ NCMEC. 2020. CyberTipline 2020: Rise in Online Enticement and Other Trends From Exploitation Stats

⁵ Livingstone and Stoilova. 2021. The 4Cs: Classifying Online Risk to Children.

OECD. 2021. Children in the digital environment: Revised Typology Of Risks

⁶ UN OHCHR. 2021. General Comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment. www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx

⁷ Australian Government eSafety Commissioner. 2018. Safety by Design. <https://www.esafety.gov.au/about-us/safety-by-design>

Tantangan global

Populasi anak di seluruh dunia tumbuh dan sementara banyak anak masuk ke dunia online untuk pertama kalinya, banyak lainnya tetap tidak terhubung dan kehilangan kesempatan yang ditawarkan Internet bagi anak-anak untuk belajar, bermain, berkomunikasi, dan terlibat. Kesenjangan digital melampaui masalah konektivitas dan sangat terkait dengan keterampilan digital dan literasi digital anak-anak dan keluarga.

Untuk menjadi warga digital yang percaya diri, dan untuk menghasilkan generasi masa depan wirausahawan digital, inovator, dan pemimpin masa depan, anak-anak harus diberikan tidak hanya akses ke Internet tetapi juga perlindungan dari bahaya online, dan keterampilan kewarganegaraan digital untuk menavigasi risiko dan ancaman online. Hanya melalui konektivitas yang bermakna (menghubungkan, melindungi, dan mendidik anak-anak di lingkungan online), dan dengan berinvestasi di masa depan masyarakat, kemakmuran ekonomi dan politik, transformasi digital yang setara dan aman dapat dicapai. Contoh upaya untuk memperluas konektivitas di antara anak-anak termasuk Giga,⁸ yang diluncurkan oleh UNICEF dan ITU pada September 2019, untuk menghubungkan setiap sekolah ke Internet dan setiap anak muda dengan informasi, peluang, dan pilihan.

Konektivitas yang berarti⁹ dan pendidikan keamanan online¹⁰ sekarang lebih penting dari sebelumnya. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan kebutuhan mendesak untuk bertindak dan memperkuat konektivitas yang bermakna untuk menegakkan hak-hak anak, dan telah menempatkan anak-anak pada risiko bahaya yang lebih tinggi melalui konektivitas tersebut.¹¹ Jika anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu online, demikian pula para pelaku yang melakukan *grooming* pada anak, mencari korban atau mencari dan membagikan materi pelecehan seksual terhadap anak. Untuk membantu pemangku kepentingan utama mengambil langkah-langkah mendesak untuk mengurangi potensi risiko dan memastikan pengalaman online anak-anak aman dan positif selama COVID-19, Global Partnership to End Violence against Children, bersama dengan mitranya (ITU, UNESCO, UNICEF, UNODC, WePROTECT Global Alliance, WHO, dan World Childhood Foundation USA) merilis catatan teknis dan paket sumber daya.¹²

Bukti menunjukkan bahwa anak-anak yang lebih rentan saat online seringkali lebih rentan saat offline, dan bahwa faktor pelindung offline juga dapat mengurangi paparan terhadap risiko online.¹³ Anak-anak yang rentan, atau mereka yang hidup dengan risiko atau kerugian offline, lebih rentan terhadap risiko online dan, pada gilirannya, mendapati diri mereka lebih mungkin mengalami bahaya dan kurang mampu menemukan dukungan.



Figure 4 satu dari lima anak di Uni Eropa mengalami pelecehan dan eksploitasi seksual.

Karena sifat global dari lingkungan digital, kerja sama internasional diperlukan untuk mengembangkan respons yang efektif. Namun, kurangnya harmonisasi undang-undang yang sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional (seperti UN CRC dan protokol opsionalnya) dan kerjasama internasional serta investasi khusus yang tidak memadai tetap menjadi tantangan utama untuk perlindungan anak secara online. Dimensi internasional ini dan kebutuhan akan kerja sama transnasional lebih lanjut menjadi semakin nyata dengan adanya panduan resmi dari UN CRC. *General Comment No. 25 (2021) tentang hak-hak anak dalam kaitannya dengan lingkungan digital*,¹⁴ yang tidak hanya menyatakan bagaimana teknologi digital mempengaruhi seluruh hak anak secara positif dan negatif, tetapi lebih jauh lagi menyerukan harmonisasi internasional dalam masalah ini. *General Comment* menargetkan pemangku kepentingan utama untuk mengakui pentingnya pertimbangan hak anak di lingkungan digital dan menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar hak anak di Internet. Ini menyerukan tindakan yang lebih besar dan kapasitas kelembagaan dalam situasi kekerasan dan pelecehan terhadap anak-anak, dan tanggung jawab yang lebih besar dari Negara dan bisnis untuk menyediakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak.

Di tingkat nasional, hanya sedikit pemangku kepentingan terkait yang cukup terlibat, anak-anak dan orang tua mereka, pengasuh dan wali jarang diajak berkonsultasi, dan dampak dan tanggung jawab sektor swasta terhadap hak-hak anak sering diabaikan. Mekanisme pencegahan dan respon keamanan online jarang dimasukkan dalam agenda pencegahan sistem perlindungan anak dan kekerasan terhadap anak (*violence against children/VAC*), dan kompleksitas faktor risiko dan protektif, dan keterkaitan antara VAC offline dan online jarang dikenali dan dipahami sepenuhnya. Dengan sedikit kemungkinan kegiatan yang diselenggarakan tentang perlindungan online anak, seringkali ada tantangan dalam upaya koordinasi yang sedikit dan jarang. Tantangan tetap ada dalam pengembangan kerangka kebijakan nasional yang diperlukan terkait dengan keamanan platform digital, literasi digital, dan kesadaran masyarakat luas tentang masalah perlindungan online anak. Tanpa mengisi kesenjangan ini, transisi menuju lingkungan digital yang inklusif dan dengan demikian inklusi ekonomi dan sosial akan tetap sulit dicapai, membawa konsekuensi lebih lanjut bagi ekonomi nasional dan seterusnya.

Di tingkat pengembangan desain dan solusi, ada juga peluang untuk menyatukan partisipasi industri dan anak. Contoh upaya tersebut antara lain portofolio Safe Online dan Technology Coalition Research Fund yang dilaksanakan oleh Global Partnership to End Violence against Children,¹⁵ ITU COP Guidelines for industry (2020), ITU Youth survey dilaksanakan oleh Youth and Media, Berkman Klein

⁸ Giga Connect. 2019. <https://gigaconnect.org/>

⁹ Konektivitas di sini dipahami sebagai kerangka kerja untuk melacak komponen konektivitas yang paling penting bagi pengguna dan membantu pengambil keputusan mengadopsi kebijakan yang diperlukan untuk menghubungkan orang ke Internet yang berguna dan memberdayakan.

¹⁰ An overview of existing educational frameworks can be found at Cortesi, Sandra, Alexa Hasse, Andres Lombana-Bermudez, Sonia Kim, and Urs Gasser. 2020. *Youth and Digital Citizenship+ (Plus): Understanding Skills for a Digital World*. Berkman Klein Center for Internet & Society

¹¹ Lobe, B., Velicu, A., Staksrud, E., Chaudron, S. and Di Gioia, R. 2020. *How children (10-18) experienced online risks during the Covid-19 lockdown*

¹² Global Partnership to End Violence against Children and Partners. 2020. *Resource Pack: COVID-19 and its implications for protecting children online*

¹³ UNICEF. 2021. *Investigating Risks and Opportunities for Children in a Digital World*

¹⁴ Lebih lanjut tentang *General Comment* termasuk glosarium terminologi, catatan penjelasan dan versi ramah anak, dapat ditemukan at OHCHR | GC children's rights in relation to the digital environment

¹⁵ Global Partnership to End Violence against Children. 2021. *The Safe Online Portfolio and The Tech Coalition Safe Online Research Fund*

Perlindungan online anak merupakan tantangan global.

Karena kemajuan pesat dalam teknologi dan masyarakat, dan sifat Internet tanpa batas, perlindungan online anak harus gesit dan adaptif agar efektif.

Perlindungan online anak memerlukan strategi holistik untuk membangun lingkungan digital yang aman, peka gender, sesuai usia, inklusif, dan menghargai hak-hak anak dan remaja yang bercirikan:

- pendekatan berbasis hak anak, menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab masyarakat untuk menghormati hak-hak anak sebagaimana diabadikan dalam UN CRC dan General Comment No. 25 (2021) tentang hak-hak anak dalam kaitannya dengan lingkungan digital;¹
- keseimbangan dinamis antara memastikan perlindungan dan memberikan kesempatan yang sama dan aman bagi anak-anak untuk menjadi warga digital;
- pencegahan semua bahaya;
- respons, dukungan, dan swadaya yang berpusat pada anak dalam menghadapi ancaman, dengan referensi khusus pada krisis COVID-19 dan skenario respons dan pemulihan terkait hal itu.

Pendekatan ini juga harus memasukkan partisipasi anak dalam desain, implementasi, dan evaluasi solusi untuk menjaga anak-anak tetap aman saat online.

¹ UN OHCHR. 2021. General comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment. www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvironment.aspx

Center for Internet & Society, Universitas Harvard,¹⁶ Alat dan panduan UNICEF untuk industri dalam memasukkan pertimbangan hak anak¹⁷ atau Safety by Design yang direvisi¹⁸ (eSafety Commissioner of Australia 2018) atau Risky-by-Design¹⁹ (5Rights Foundation 2021) initiatives, yang menempatkan hak dan keamanan anak di pusat desain, pengembangan, dan peluncuran produk dan layanan online.

Mengembangkan strategi nasional

Untuk merespons secara efektif risiko dan bahaya online bagi anak-anak, strategi perlindungan online anak nasional multi-stakeholder yang inklusif mencakup pengembangan kebijakan baru (dan mengintegrasikan dan merujuk kebijakan yang ada) dan akan memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk tantangan global perlindungan anak online.²⁰ Strategi tersebut harus sepenuhnya terintegrasi dengan kerangka kebijakan yang relevan dengan hak-hak anak dan melengkapi kebijakan perlindungan anak nasional dengan menawarkan kerangka kerja khusus untuk semua risiko dan potensi bahaya bagi anak-anak yang bertujuan untuk memastikan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan memberdayakan.

Strategi semacam itu memperkuat koordinasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan dan harus mempertimbangkan pentingnya, mengartikulasikan visi, dan menentukan peran para pemangku kepentingan berikut:

- kementerian pemerintah di tingkat lokal, nasional dan regional (misalnya urusan dalam negeri, kesehatan, pendidikan, peradilan, kesejahteraan sosial/perlindungan anak, digital/informasi, regulator);

- penegakan hukum;
- organisasi layanan perawatan sosial dan kesehatan (misalnya konseling, layanan dukungan, kantor kesejahteraan pemuda, rumah aman, rehabilitasi, layanan perawatan kesehatan);
- Industri TIK – mis. platform online, penyedia konten, penyedia layanan Internet (ISP) dan penyedia layanan elektronik (ESP), penyedia jaringan telepon seluler, penyedia Wi-Fi publik;
- Organisasi internasional, LSM, OMS dan organisasi berbasis masyarakat (misalnya, perlindungan anak dan organisasi dan LSM internasional terkait lainnya, serikat guru/orang tua dan organisasi);
- anak-anak dan remaja, serta orang tua, wali dan pengasuh mereka;
- komunitas akademik dan penelitian (misalnya think-tank, pusat penelitian, perpustakaan, sekolah dan universitas).

Strategi perlindungan online anak nasional menyediakan roadmap untuk menyatukan dan mengkoordinasikan kegiatan yang ada dan baru yang relevan untuk perlindungan anak (online). Setiap strategi harus dimiliki oleh otoritas yang sesuai dan berkelanjutan dengan sumber daya manusia dan keuangan yang dibutuhkan. Kerangka tersebut harus memiliki mandat yang jelas dan kewenangan yang cukup melalui mekanisme multi-stakeholder (atau dewan) untuk mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan hak-hak anak dan media digital dan TIK di tingkat lintas sektor, nasional, regional, dan lokal, menghargai upaya yang ada. dalam pendefinisian, koordinasi, implementasi dan pemantauan strategi nasional perlindungan online anak.

¹⁶ ITU Generation Connect. Youth and Media, Berkman Klein Center for Internet & Society, Harvard University. 2020., ITUGeneration Connect. 2020 Youth Engagement Survey and Data and Interpretation

¹⁷ UNICEF. 2021. https://sites.unicef.org/csr/ict_tools.html

¹⁸ Australian e-Safety Commissioner. 2018. Safety by Design Initiative

¹⁹ 5Rights Foundation. 2021. Risky-by-Design Initiative

²⁰ Contoh kerangka relevan yang ada: Sehubungan dengan eksploitasi dan pelecehan seksual online anak: WePROTECT Global Alliance. 2016. WePROTECT Model National Response and 2019. Global Strategic Response framework. Sehubungan dengan kekerasan terhadap anak: World Health Organization. 2016. INSPIRE framework

Prinsip menyeluruh

Strategi perlindungan online anak nasional yang berwawasan ke depan dan holistik termasuk kebijakan yang relevan dan mekanisme penegakan/akuntabilitas, harus dikembangkan dengan mempertimbangkan sepuluh prinsip lintas sektoral:

1. Didasarkan pada visi holistik yang menggabungkan pemerintah, industri, dan masyarakat, memastikan tindakan dan akuntabilitas multi-sektoral.
2. Ditetapkan pada tingkat pemerintahan tertinggi, yang akan bertanggung jawab untuk menetapkan peran dan tanggung jawab yang relevan dan mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai.
3. Hasil dari pemahaman berbasis bukti yang mencakup semua lingkungan digital namun disesuaikan dengan prioritas nasional.
4. Menghormati dan konsisten dengan hak-hak dasar dan kebebasan anak-anak sebagaimana diabadikan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak dan konvensi dan hukum internasional penting lainnya.
5. Menghormati, konsisten dengan, dan membangun berdasarkan hukum dan strategi domestik yang ada, serupa, dan terkait yang ada.
6. Dikembangkan dengan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan yang relevan termasuk anak-anak dan keluarga mereka, memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab mereka, dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan.
7. Dirancang untuk menyelaraskan dengan rencana pemerintah yang lebih luas untuk pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk investasi dan mobilisasi sumber daya untuk upaya perlindungan anak online.
8. Memanfaatkan instrumen kebijakan yang paling tepat yang tersedia untuk mewujudkan tujuannya.
9. Memandu upaya pemangku kepentingan untuk memberdayakan dan mendidik anak, pengasuh, dan pendidik sebagai warga digital termasuk akses digital, pemerataan, dan literasi digital.
10. Berkontribusi pada pengembangan lingkungan digital tepercaya yang aman bagi anak-anak.

Tindakan kebijakan

Tindakan kebijakan berikut bertujuan untuk mengatasi semua risiko dan potensi bahaya bagi anak-anak secara online dan dimaksudkan untuk dilengkapi dengan kerangka kerja yang lebih spesifik seperti WePROTECT Model National Response (MNR) tentang eksploitasi dan pelecehan seksual anak, yang berfokus pada bahaya tertentu.

Hak anak

- Standarisasi definisi anak sebagai orang di bawah usia 18 tahun dalam semua dokumen hukum sesuai dengan Pasal 1 Konvensi PBB tentang Hak Anak (UN CRC).
- Membangun dan berkolaborasi dengan lembaga hak asasi manusia independen untuk anak untuk memastikan perlindungan anak secara online melalui keahlian khusus, investigasi dan pemantauan, promosi, peningkatan kesadaran, pelatihan dan pendidikan, dan dengan partisipasi anak.
- Memasukkan konsultasi langsung dengan anak-anak sebagaimana hak mereka berdasarkan Pasal 12 UN CRC, ke dalam pengembangan, implementasi, dan pemantauan segala jenis kerangka kerja atau rencana aksi perlindungan online anak.

Perundang-undangan

- Tinjau kerangka hukum yang ada untuk menentukan bahwa semua kekuatan hukum yang diperlukan ada untuk memungkinkan dan membantu penegak hukum dan aktor terkait lainnya untuk melindungi orang di bawah usia 18 tahun dari semua jenis bahaya online di semua platform online.

- Menetapkan bahwa setiap tindakan ilegal terhadap seorang anak di dunia nyata adalah, *mutatis mutandis*, ilegal secara online dan bahwa perlindungan data online dan aturan privasi untuk anak-anak sudah memadai.
- Menyelaraskan kerangka hukum dengan standar, undang-undang, dan konvensi internasional yang ada terkait dengan hak-hak anak dan keamanan siber, memfasilitasi kerja sama internasional melalui harmonisasi undang-undang.
- Mendorong penggunaan terminologi yang tepat dalam pengembangan undang-undang dan kebijakan yang menangani pencegahan dan perlindungan eksploitasi seksual dan pelecehan seksual terhadap anak-anak.

Child sexual abuse material (CSAM)

Harus ada undang-undang yang menjadikannya pelanggaran pidana untuk mengunduh, mengakses, melihat, menyimpan, memiliki, mendistribusikan, menampilkan, atau memamerkan dan menyediakan konten seksual apa pun yang menggambarkan dan menampilkan anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk tujuan seksual.

Menyelaraskan legislasi nasional dengan kerangka kerja yang ada seperti [Guidelines regarding the implementation of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography \(2019\)](#) dari Committee of the Rights of the Child, [ICMEC CSAM Model Legislation & Global Review \(2018\)](#), atau kerangka kerja indikator panduan dan hasil kerangka INSPIRE tentang legislasi tentang pelecehan dan eksploitasi seksual (2018).

Penegakan hukum

- Memastikan bahwa kasus anak-anak yang menyakiti orang lain secara online ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak, yang tercantum dalam undang-undang nasional, sangat mendukung alat selain hukum pidana.
- Menyediakan sumber daya keuangan dan manusia yang sesuai, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk sepenuhnya melibatkan dan melengkapi komunitas penegak hukum.
- Memastikan kerjasama internasional antara lembaga penegak hukum di seluruh dunia, memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kejahatan yang difasilitasi secara online.

Peraturan

- Pertimbangkan pengembangan kebijakan regulasi (pengembangan kebijakan regulasi bersama, kerangka regulasi penuh).
- Menempatkan kewajiban pada bisnis untuk melakukan uji tuntas hak-hak anak dan untuk melindungi penggunanya.
- Menetapkan mekanisme pemantauan untuk penyelidikan dan pemulihan pelanggaran hak anak, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas TIK dan perusahaan terkait lainnya.
- Memperkuat tanggung jawab badan pengatur untuk pengembangan standar yang relevan dengan hak-hak anak dan TIK.

Monitoring dan evaluasi

- Membangun platform multi-stakeholder untuk mengarahkan pengembangan, implementasi, dan pemantauan agenda digital nasional untuk anak-anak.
- Mengembangkan tujuan terikat waktu dan proses transparan untuk mengevaluasi dan memantau kemajuan dan memastikan bahwa sumber daya manusia, teknis, dan keuangan yang diperlukan tersedia untuk operasi yang efektif dari strategi perlindungan online anak nasional dan elemen terkait.

Industri TIK

- Libatkan industri dalam proses penjabaran undang-undang perlindungan anak online dan metrik umum untuk mengukur semua aspek yang relevan dari keamanan online anak.
- Menetapkan insentif dan menghilangkan hambatan hukum untuk memfasilitasi pengembangan standar dan teknologi umum untuk memerangi risiko konten bagi anak-anak.
- Mendorong industri untuk mengadopsi keamanan dan privasi dengan pendekatan desain untuk produk, layanan, dan platform, mengakui penghormatan terhadap hak-hak anak sebagai tujuan inti.
- Memastikan bahwa industri menggunakan mekanisme yang ketat untuk mendeteksi, memblokir, menghapus, dan secara proaktif melaporkan konten ilegal dan segala penyalahgunaan (diklasifikasikan sebagai aktivitas kriminal) terhadap anak-anak.
- Pastikan bahwa industri menyediakan mekanisme pelaporan yang sesuai dan ramah anak bagi penggunanya untuk melaporkan masalah dan kekhawatiran dan di mana pengguna dapat memperoleh dukungan lebih lanjut.
- Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan

industri untuk meningkatkan kesadaran guna mendukung industri untuk mengidentifikasi bahaya dalam pengembangan dan memperbaiki produk dan layanan yang ada. Ini termasuk mempertimbangkan kekhawatiran pemangku kepentingan lainnya dan risiko serta bahaya yang dihadapi pengguna akhir.

Dukung pemangku kepentingan industri untuk menyediakan alat ramah keluarga yang sesuai dengan usia untuk membantu penggunanya mengelola perlindungan keluarga mereka secara online dengan lebih baik.

Pelaporan

- Membangun dan mempromosikan secara luas mekanisme untuk dengan mudah melaporkan konten ilegal yang ditemukan di Internet.
- Membangun saluran bantuan anak nasional dengan kapasitas yang diperlukan tentang risiko dan bahaya yang difasilitasi secara online atau saluran bantuan anak/anak untuk memfasilitasi pelaporan masalah keamanan online anak oleh para korban.
- Membangun mekanisme konseling, pelaporan, dan pengaduan sensitif anak yang aman dan mudah diakses.

Layanan sosial dan dukungan korban

- Memastikan bahwa mekanisme perlindungan anak yang universal dan sistematis ada yang mewajibkan semua orang yang bekerja dengan anak (misalnya perawatan sosial, profesional kesehatan, pendidik) untuk mengidentifikasi, menanggapi, dan laporkan segala bentuk kerusakan pada anak-anak yang terjadi secara online.
- Pastikan profesional layanan sosial dilatih baik untuk tindakan pencegahan dan tanggapan terhadap bahaya online terhadap anak-anak, mengidentifikasi pelecehan anak dan memberikan dukungan dan bantuan khusus dan jangka panjang yang memadai untuk anak-anak korban pelecehan.
- Mengembangkan strategi dan tindakan pencegahan pelecehan anak berdasarkan bukti ilmiah.
- Menyediakan sumber daya manusia dan keuangan yang tepat untuk memastikan pemulihan penuh dan reintegrasi anak-anak dan untuk mencegah reviktimisasi korban anak.
- Memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke perawatan kesehatan yang memadai (termasuk kesehatan mental serta kesejahteraan fisik) termasuk jika terjadi viktimisasi, trauma, atau pelecehan online.

Pengumpulan data dan penelitian

- Berinvestasi dan menyelaraskan pengembangan, pemantauan dan evaluasi kerangka kerja dan kegiatan.
- Melakukan penelitian spektrum aktor dan pemangku kepentingan nasional untuk menentukan pendapat, pengalaman, perhatian, dan peluang mereka terkait dengan perlindungan online anak.

Pendidikan

- Pastikan pendidik dan administrator/profesional sekolah dilatih untuk mengidentifikasi dan merespon secara memadai dalam kasus dugaan atau konfirmasi kasus anak korban kekerasan.

- Mengembangkan program literasi digital yang luas yang sesuai dengan usia dan berfokus pada keterampilan dan kompetensi untuk memastikan bahwa anak-anak dapat sepenuhnya manfaat dari lingkungan online, dilengkapi untuk mengidentifikasi ancaman, dan dapat sepenuhnya memahami implikasi dari perilaku mereka dapat dibangun di atas kerangka pendidikan yang ada.
- Mengembangkan fitur literasi digital sebagai bagian dari kurikulum sekolah nasional yang sesuai usia dan dapat diterapkan pada anak sejak dini.
- Menciptakan sumber daya pendidikan di luar kurikulum sekolah yang menekankan aspek positif dan pemberdayaan Internet untuk anak-anak dan mempromosikan bentuk perilaku online yang bertanggung jawab.
- Hindari pesan berbasis rasa takut.
- Berkonsultasi dengan anak-anak, serta orang tua dan wali tentang pengembangan program, alat, dan sumber pendidikan.

Kesadaran dan kapasitas nasional

- Mengembangkan kampanye kesadaran publik nasional, yang mencakup berbagai masalah yang dapat dikaitkan dengan lingkungan digital dan disesuaikan dengan semua kelompok sasaran.
- Melibatkan institusi publik dan media massa untuk mempromosikan kampanye kesadaran publik nasional.
- Memanfaatkan kampanye global, serta kerangka kerja dan inisiatif multistakeholder untuk membangun kampanye nasional dan memperkuat kapasitas nasional tentang perlindungan online anak.

Referensi

Global Partnership to End Violence against Children and partners (ITU, UNESCO, UNICEF, UNODC, WePROTECT Global Alliance and World Childhood Foundation USA), Technical note: COVID-19 and its implications for protecting children online, 2020.

Global Partnership to End Violence against Children and partners (ITU, UNESCO, UNICEF, UNODC, WePROTECT Global Alliance and World Childhood Foundation USA), Resource pack: COVID-19 and its implications for protecting children online, 2020.

European Council. 2020. One in five children suffers one or another form of sexual abuse or victimisation during their childhood.

Livingstone and Stoilova. 2021. *The 4Cs: Classifying Online Risk to Children*

Office of the Special Representative of the Secretary General on Violence against Children. 2021. *Children as agents of positive change*

ITU. 2020. Guidelines for policy-makers on Child Online Protection

ITU. 2020. Guidelines for industry on Child Online Protection

ITU. 2020. Guidelines for parents and educators on Child Online Protection

ITU. 2020. Guidelines for children on Child Online Protection

ITU. 2020. *Measuring digital development*

ITU, UNESCO: Broadband Commission. 2019. *Child Safety Online: Minimizing the Risk of Violence, Abuse and Exploitation Online*

ITU and ILO, IOM, UNICEF, UNHCR, UNOHR, UNODC. 2020. *Inter-Agency Working Group on Violence against Children Agenda for Action*

UNICEF. 2021. *Investigating Risks and Opportunities for Children in a Digital World*

United Nations. 2020. Policy Brief: The impact of COVID-19 on children

WePROTECT Global Alliance. 2015. *Working to protect children from the growing threat of sexual exploitation and abuse online*

Untuk sumber daya lebih lanjut, silakan merujuk ke materi referensi dalam Pedoman ITU untuk pembuat kebijakan tentang Perlindungan Online Anak dan daftar sumber tambahan di <http://www.itu-cop-guidelines.com>.